

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Adinda. 2021. *Efektivitas Pelayanan Perizinan Dengan Sistem Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banda Aceh*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan: <https://share.google/LJakR5OG0W8XNBs0Q>.
- Ardiansyah. 2023. *Hukum Perizinan*. Yogyakarta: Grup Penerbit CV Budi Utama.
- Abubakar, R. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga.
- ARS Management. *Pendaftaran Legalitas Usaha Melalui Online Single Submission (OSS) – Perijinan Usaha Berbasis Risiko*. Yogyakarta.
- DPMPTSP. 2025. *Laporan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Triwulan I Tahun 2025*. Hulu Sungai Utara: Kepala DPMPTSP.
- Fiantika, F. R. *Et al.* 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Gunawan, CYF, Purnamaningsih, PE, & Winaya, IK (2023). Efektivitas Penerapan Program Pelayanan Perizinan Berbasis Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). *Tinjauan Bisnis dan Investasi* , 1 (4), 9-14.
- Hertati, D. 2019. *Efektivitas Pelayanan Surat Izin Usaha Perdagangan Melalui Surabaya Single Windows Di Unit Pelayanan Terpadu Satu Atap Surabaya Pusat Kota Surabaya*. Surabaya: CV. Mitra Sumber Rejeki.
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak.
- Laksito, J., dan Dra Dyah Listyarini. 2024. *Hukum Perizinan*. Semarang: Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Legalitas. Org. 2023. *Sejarah OSS (Online Single Submission)*. Tersedia <https://legalitas.org/tulisan/sejarah-oss-online-single-submission>. Diakses pada 31 Agustus 2025.
- Nofsy, F. A. 2022. *Efektivitas Online Single Submission (OSS) Dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Kota Padang Provinsi Sumatera Barat* (Doctoral dissertation, Institut Pemerintahan Dalam Negeri).

- Oktaningingtyas, F. 2023. *Efektivitas Sistem Online Single Submission (OSS) dalam Pengurusan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Magelang*. Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik: <https://share.google/hWmXjSXCQJHOWHuCa>.
- OSS. 2025. *Pengajuan Perizinan Berusaha Skala Mikro Rendah*. Tersedia: <https://oss.go.id/id/panduan/691013fe842735f0df698830>.
- Pemerintah Daerah. (2023). Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Perangkat Daerah. Amuntai: Sekretaris Daerah.
- Pemerintah Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Indonesia. (2025). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia.(2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038. Jakarta: Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Revida, E. *Et al.* 2021. Manajemen Pelayanan Publik. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Sahir, S.H. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia.
- Sawir, M. 2020. *Birokrasi Pelayanan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Grup Penerbitan Cv Budi Utama.
- Sugiyono, 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Edisi Kedua. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Tim Penyusun, 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program S1 Administrasi Publik*. Amuntai. Presiden Republik Indonesia.